

**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**TAHUN 2025**

**KECAMATAN KAMPAK**

**PEMERINTAH KABUPATEN  
TRENGGALEK**



**# bangga  
melayani  
bangsa**

# KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur patut kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kuasa-NYA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun penyusunan laporan ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disamping merupakan sebuah kewajiban, dapat dipahami pula sebagai suatu niat baik dan tekad yang baik dari Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan dan akuntabel melalui pembangunan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara utuh dan berkelanjutan.

Dari capaian yang telah dicapai saat ini, kami menyadari masih banyak hal yang perlu dibenahi, maka kami instruksikan kepada semua komponen dalam jajaran Pemerintah Kecamatan Kampak agar lebih memahami dan melaksanakan SAKIP dengan baik serta memberikan sumbangsinya baik tenaga, pikiran dan sebagainya sesuai dengan bidang tugas dan keahlian masing-masing.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta kontribusi dalam pencapaian dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, semoga hasil laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka penyempurnaan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan serta penyempurnaan berbagai kebijakan pada masa yang akan datang.

Trenggalek, 18 Februari 2026



# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian, evaluasi, dan perencanaan instansi selama periode yang dilaporkan. Berikut adalah poin-poin utama dalam laporan ini:

1. **Pendahuluan**
  - Penjelasan singkat tentang tujuan penyusunan laporan dan pentingnya transparansi dalam penyampaian kinerja instansi.
  - Dasar hukum yang menjadi acuan penyusunan laporan kinerja ini.
2. **Profil Instansi**
  - Visi, Misi, dan Tujuan: Menyampaikan visi, misi, dan tujuan instansi yang menjadi landasan dalam menjalankan program-programnya.
  - Tugas Pokok dan Fungsi: Menguraikan tugas dan fungsi utama instansi yang berkaitan dengan pelayanan publik dan pemerintahan.
  - Struktur Organisasi: Gambaran umum tentang struktur organisasi instansi, termasuk unit-unit kerja yang terlibat dalam pelaksanaan tugas.
3. **Realisasi Kinerja**
  - Program dan Kegiatan: Penjelasan mengenai program dan kegiatan utama yang telah dilaksanakan selama periode yang dilaporkan.
  - Capaian Kinerja: Menyampaikan hasil yang telah dicapai, baik yang sudah sesuai target maupun yang belum tercapai. Ini mencakup pencapaian indikator kinerja utama (IKU).
  - Analisis Kinerja: Menilai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pencapaian hasil, serta langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki kinerja.
4. **Pengelolaan Anggaran**
  - Alokasi dan Realisasi Anggaran: Menyajikan informasi tentang anggaran yang dialokasikan untuk program dan kegiatan serta realisasi penggunaan anggaran selama periode tersebut.
  - Kepatuhan terhadap Peraturan: Penjelasan mengenai bagaimana instansi mematuhi peraturan yang berlaku dalam pengelolaan anggaran.
5. **Tantangan dan Kendala**
  - Mengidentifikasi tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, serta dampaknya terhadap pencapaian kinerja instansi.

## 6. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

- Rekomendasi: Berisi saran-saran untuk perbaikan di masa mendatang, baik terkait dengan program, kegiatan, maupun pengelolaan anggaran.
- Tindak Lanjut: Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi kendala dan meningkatkan kinerja di masa depan.

## 7. Penutup

- Kesimpulan umum tentang kinerja instansi selama periode yang dilaporkan, serta harapan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	vi
<b>BAB I</b> PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Gambaran Umum Kecamatan Kampak .....	8
1.3 Isu – Isu Strategis.....	22
1.4 Landasan Hukum .....	23
1.5 Sistematika Pelaporan .....	25
<b>BAB II</b> PERENCANAAN KINERJA.....	26
2.1 Perencanaan Strategis Kecamatan Kampak 2025-2029.....	26
2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kampak Tahun 2025...	42
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 .....	43
2.4 Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Kampak Tahun 2025 .....	45
<b>BAB III</b> AKUNTABILITAS KINERJA.....	55
3.1 Pengukuran Kinerja Tahun 2025.....	55
3.2 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025.....	58
3.4 Realisasi Anggaran .....	66

BAB IV PENUTUP.....	80
---------------------	----

## DAFTAR TABEL

1.1 :	Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Kampak Tahun 2025.....	12
1.2 :	Komposisi Pegawai PNS dan PPPK Kecamatan Kampak Tahun 2025.....	13
1.3 :	Daftar Pegawai Kecamatan Kampak Tahun 2025.....	14
1.4 :	Barang yang Dikelola Kecamatan Kampak .....	16
1.5 :	Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Kampak ...	22
2.1 :	Matrik Perencanaan Kinerja Kecamatan Kampak .....	31
2.2 :	Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	42
2.3 :	Perjanjian Kinerja 2025.....	44
2.4 :	Perbandingan Perjanjian Kinerja Sebelum dan Sesudah Perubahan .....	44
2.5 :	Perbandingan Perjanjian Kinerja yang mengalami Perubahan antar Sebelum dan Sesudah Perubahan .....	45
2.6 :	Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 .....	46
3.1 :	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 .....	56
3.2 :	Analisis Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 .....	58
3.2.1:	Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran 1 Tahun 2025 .....	59
3.2.2:	Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran 2 Tahun 2025 .....	61
3.4 :	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan Kecamatan Kampak Tahun 2025 .....	62

3.5 :	Realisasi Anggaran Kecamatan Kampak Tahun 2025 .....	66
3.6 :	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Tahun 2025 .....	75
3.7 :	Perbandingan dan Tingkat Efisiensi Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Kecamatan Kampak Tahun 2025 .....	78

## DAFTAR GAMBAR

1.1 :	Peta Administrasi Kecamatan Kampak .....	10
1.2 :	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan .....	21

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kampak selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Trenggalek, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota/Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Organisasi Pemerintah Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan Kampak mengimplementasikan visi dan misi Kabupaten Trenggalek yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Kampak Tahun 2025-

2029, dan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029.

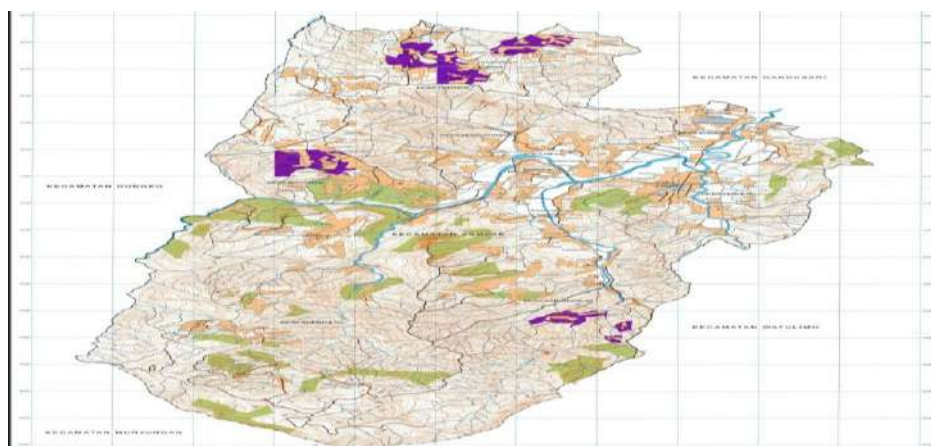
Pelaporan dimaksud dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja Kecamatan Kampak sekaligus sebagai pertanggungjawaban terhadap kontrak kerja yang telah disepakati antara Camat Kampak dengan Bupati Trenggalek yang sudah tertuang dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Kampak.

## I.2. Gambaran Umum

Kecamatan Kampak berdomisili di jalan Raya Kampak - Munjungan Km 01 di Desa Bendoagung Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek. Dengan luas wilayah 115,17 KM<sup>2</sup> atau sebanding dengan, 6.029,33 Ha terdiri dari 359.61 Ha. Lahan sawah dan 5.669,72 Ha lahan kering, Secara Geografis Kecamatan Kampak terletak pada koordinat diantara 111'24 s/d 112'11 Bujur Timur 7'53 s/d 8'34 Lintang Selatan dengan ketinggian 120 - 900 meter diatas permukaan air laut.

Adapun batas – batas wilayah Kecamatan Kampak, yaitu :

1. Sebelah Utara : Kec. Gandusari dan Suruh
2. Sebelah Timur : Kec. Watulimo dan Gandusari
3. Sebelah Selatan : Kec. Munjungan dan Watulimo
4. Sebelah Barat : Kec. Kampak dan Munjungan



Gambar I.2 Peta Administrasi Kecamatan Kampak

Wilayah Kecamatan Kampak terdiri dari 7 ( Tujuh ) desa, yaitu :

- 1) Desa Bendoagung
- 2) Desa Bogoran
- 3) Desa Ngadimulyo
- 4) Desa Karangrejo
- 5) Desa Senden
- 6) Desa Sugihan
- 7) Desa Timahan

Ekonomi makro Kecamatan Kampak tergambar dalam luas area layanan Kecamatan Kampak di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek sebesar 7.519 Ha, yang tercakup dalam 7 (tujuh) desa, dengan jumlah dusun sebanyak 23 (dua puluh tiga ) Dusun, meliputi 77 Rukun Warga (RW) dan 251 Rukun Tetangga (RT) dan orbitasi (jarak terdekat/terjauh) antara Kecamatan (ibu kota Kecamatan) dengan :

- jarak desa terjauh : 19 Km
- jarak dengan kabupaten : 26 Km
- jarak dengan propinsi : 215 Km

Wilayah Kecamatan Kampak memiliki iklim dengan curah hujan rata rata per tahun 1.171 mm dan suhu rata rata 24°-31°C.

Dengan jumlah penduduk kurang lebih 38.806 jiwa dengan komposisi 19.516 penduduk laki laki dan 19.291 penduduk perempuan. Di Kecamatan Kampak pertanian merupakan salah satu mata pencaharian utama dengan luas tanah sawah seluas 338 Ha, tanah kering 7.562 Ha. Selain pertanian kegiatan ekonomi di kecamatan Kampak antara lain di bidang peternakan, ada usaha penggalian/pertambangan, ada industri pengolahan, transportasi dan perdagangan.

Sedangkan fasilitas umum untuk pelayanan kepada masyarakat yang berada di wilayah Kecamatan Kampak terdiri dari Puskesmas 1 (satu) buah, Puskesmas Pembantu sebanyak 6 (enam) tempat, sarana prasarana Puskesmas Keliling sebanyak 2 (dua) buah.

## **1.1 Kedudukan Dan Wewenang Kecamatan**

Camat sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan penyelenggaraan program pembangunan di wilayah kerjanya. Kecamatan mempunyai wewenang, yaitu :

- a. Pengkoordinasian terhadap jalannya pemerintahan Kecamatan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- b. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya ;
- c. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat ;
- d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.

## **1.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan**

Kecamatan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan di wilayah Kecamatan, di samping juga melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, maka Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan di Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian operasional program – program pemerintah di wilayah kerjanya;
- c. Penyelenggaraan ketatausahaan di Kecamatan ;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan dan pembinaan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ;
- e. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan ;
- f. Penyelenggaraan tata kelola kependudukan ;
- g. Pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan;
- h. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;

- i. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan, serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya ;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut Kecamatan Kampak didukung dengan sumber daya manusia (SDM) sejumlah 14 (empat belas) orang (data sumber per Desember Tahun 2025) yang terdiri dari PNS sebanyak 13 (tiga belas) orang dan PPPK sebanyak 2 (dua) orang sebagai berikut ;

1. Sumber Daya Manusia

Karyawan / karyawan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek tahun 2025 berjumlah 12 (dua belas) orang dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Jumlah Pegawai Negeri Sipil**

No	Golongan / Pendidikan / Eselon / Diklat	Jumlah	Satuan
<i>Menurut Golongan</i>			
	Golongan I	0	Orang
	Golongan II	2	Orang
	Golongan III	9	Orang
	Golongan IV	1	Orang
	Jumlah Total	12	Orang
<i>Menurut Pendidikan</i>			
	Pasca Sarjana	0	Orang
	Sarjana	5	Orang
	Diploma (D-III)	0	Orang
	Diploma (D-IV)	0	Orang
	SLTA/SMA/SMK	7	Orang
	SLTP/SMP	0	Orang
	SD	0	Orang
	Jumlah Total	12	Orang
<i>Menurut Jenis Kediklatan</i>			
	Struktural	3	Orang
	Fungsional	9	Orang
	Teknis	0	Orang
	Diklat Dasar Pol PP	0	Orang
	Jumlah Total	12	Orang
<i>Menurut Jenis Kelamin</i>			
	Laki – Laki	7	Orang
	Perempuan	5	Orang
	Jumlah Total	12	Orang

*Sumber : per tanggal 31 Desember 2025*

Komposisi pegawai Kecamatan Kampak berdasarkan jenis kelamin yakni pegawai PNS laki-laki sebanyak 7 (tujuh) orang, dan perempuan sebanyak 5 (lima) orang, sedangkan untuk PPPK laki-laki sebanyak 2 (dua) orang, dan perempuan sebanyak 0 (nol) orang serta tenaga penunjang sebanyak laki-laki 0 (nol) orang dan perempuan 0 (nol) orang.

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Pegawai PNS dan PPPK pada**  
**Kecamatan Kampak Tahun 2025**

No.	Jenis Pegawai	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	7	5	12
2	PPPK	2	0	2
3	Tenaga Penunjang	0	0	0

*Sumber : per tanggal 31 Desember 2025*

## 2. Sarana dan Prasarana Kecamatan Kampak

Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Kecamatan Kampak sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2012 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah Daerah:

**Tabel 1.3**  
**Barang yang Dikelola**  
**Kecamatan Kampak Tahun 2025**

No	Jenis Barang	Jumlah (Unit)
1	Tanah	1
2	Alat-alat Angkutan	29
3	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	322
4.	Alat-alat Studio dan Komunikasi	24
5.	Komputer	46
6.	Alat-alat Kedokteran	1
7.	Bangunan Gedung	7
8.	Instalasi	0
	<b>Jumlah Total</b>	<b>430</b>

*Sumber : Pengelola Barang Kecamatan Kampak 2025*

### I.2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur organisasi

#### A. Fungsi Kecamatan Kampak

Kecamatan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan di wilayah Kecamatan, di samping juga melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, maka Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan di Kecamatan;
- b. Pengkoordinasian operasional program-program pemerintah di wilayah kerjanya;
- c. Penyelenggaraan ketatausahaan di Kecamatan;

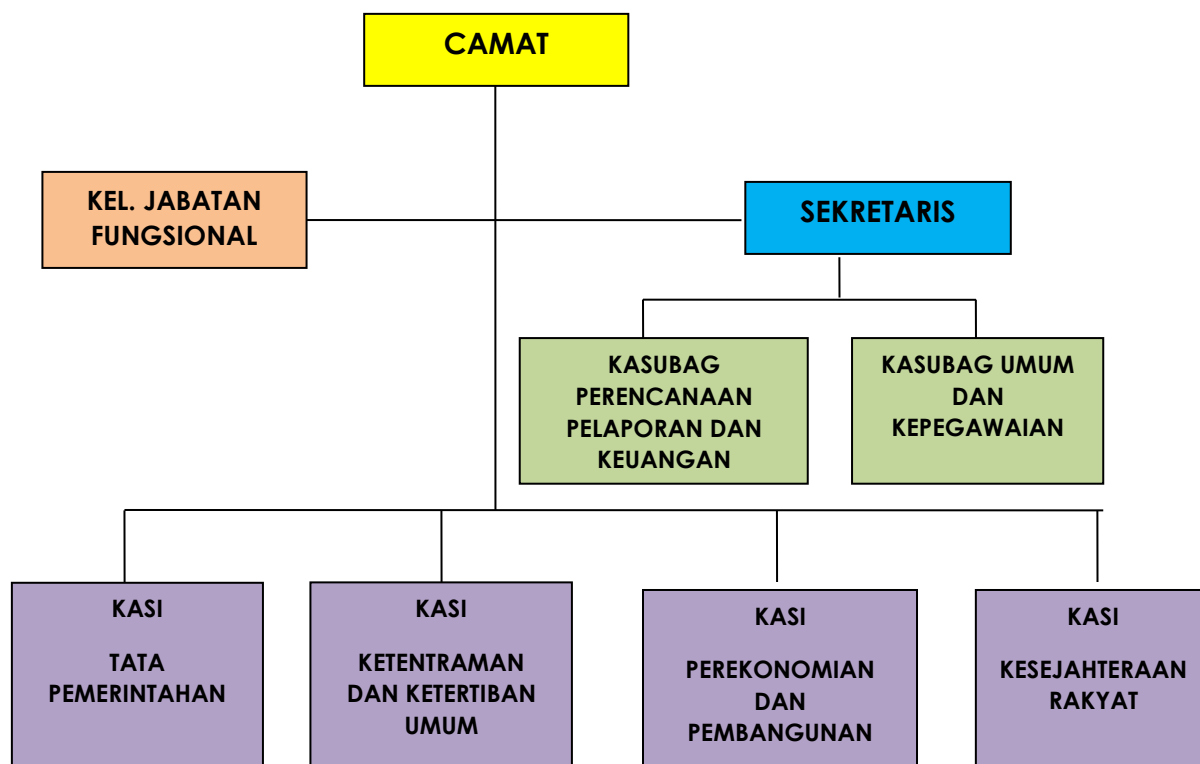
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan dan pembinaan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
- e. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- f. Penyelenggaraan tata kelola kependudukan;
- g. Pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan;
- h. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial;
- i. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan, serta penyelenggaraan tugas tampung tantra di wilayah kerjanya;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk, Kecamatan Kampak terdiri atas :

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari:
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- f. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;

Adapun Struktur organisasi Kecamatan Kampak dapat dideskripsikan sebagai berikut :



## 1. Camat

Kecamatan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan program pembangunan di wilayah Kecamatan, di samping juga melaksanakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, maka Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penjabaran kebijakan operasional pelaksanaan tugas umum pemerintahan di Kecamatan;
2. Pengkoordinasian operasional program – program pemerintah di wilayah kerjanya;
3. Penyelenggaraan ketatausahaan di Kecamatan ;

4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan Kecamatan dan pembinaan Pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan ;
5. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan ;
6. Penyelenggaraan tata kelola kependudukan ;
7. Pembinaan penyelenggaraan perekonomian dan pembangunan;
8. Pembinaan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan rakyat dan penanggulangan masalah sosial ;
9. Pengendalian dan pengawasan kegiatan pemerintahan, serta penyelenggaraan tugas tumpang tantra di wilayah kerjanya ;
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat, mempunyai tugas dan fungsi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat, berdasarkan data dan program Kecamatan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. memimpin dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- c. mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan
- d. memfasilitasi dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Kecamatan;
- e. memfasilitasi dan melaksanakan urusan surat menyurat, tata usaha, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
- f. memfasilitasi pelaksanaan pembinaan organisasi, tata laksana dan kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
- g. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan inventarisasi, penatausahaan dan pengelolaan aset/barang milik Pemerintah di lingkungan Kecamatan;
- h. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja, pembuatan laporan kegiatan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan;

- i. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana anggaran Kecamatan dan Kelurahan;
- j. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan;
- k. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan;
- l. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Kecamatan;
- m. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Kecamatan;
- n. memfasilitasi dan melaksanakan koordinasi dan melaporkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kecamatan;
- o. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
- p. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada atasan; dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

### **3. Seksi Tata Pemerintahan**

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Seksi Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok:

Seksi Tata Pemerintahan bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan, pengelolaan administrasi negara, serta pelaksanaan kebijakan dan koordinasi antara instansi pemerintah. Seksi ini juga bertanggung jawab untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemerintahan daerah serta memberikan layanan terkait peraturan dan administrasi pemerintahan.

Fungsi:

1. **Penyusunan Kebijakan Administrasi Pemerintahan:** Menyusun kebijakan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan daerah, baik yang bersifat internal maupun eksternal.
2. **Koordinasi Pemerintahan:** Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di tingkat daerah maupun pusat dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan yang efektif dan efisien.
3. **Penyusunan Program dan Kegiatan Pemerintahan:** Merencanakan, menyusun, dan mengelola program serta kegiatan yang mendukung tugas-tugas pemerintahan daerah.
4. **Pengelolaan Dokumen dan Arsip Pemerintahan:** Mengelola dokumen dan arsip yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, termasuk surat-menyurat dan dokumen penting lainnya.
5. **Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat:** Menyediakan layanan administrasi kepada masyarakat terkait dengan proses perizinan, pendaftaran, dan kebutuhan administratif lainnya.
6. **Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan:** Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.
7. **Penanganan Masalah Hukum dan Perundang-undangan:** Mengkaji dan memberikan rekomendasi terkait masalah hukum dan peraturan yang berhubungan dengan tata pemerintahan.
8. **Penyuluhan dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah:** Melakukan penyuluhan dan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

#### 4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari Seksi Ekonomi dan Pembangunan:

Tugas Pokok:

Seksi Ekonomi dan Pembangunan bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program pembangunan yang terkait dengan aspek ekonomi daerah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berkualitas. Seksi ini juga bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung pengembangan ekonomi daerah serta kesejahteraan masyarakat.

Fungsi:

1. **Perencanaan Ekonomi dan Pembangunan:** Menyusun rencana pembangunan ekonomi daerah jangka pendek, menengah, dan panjang sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah, serta menyelaraskan dengan kebijakan nasional.
2. **Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi:** Mengidentifikasi, mengelola, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ekonomi daerah (seperti sumber daya alam, manusia, dan finansial) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
3. **Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pembangunan:** Melakukan koordinasi antara berbagai instansi terkait dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan, serta memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
4. **Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan:** Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ekonomi, serta memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan untuk mencapai target pembangunan.
5. **Penyusunan Kebijakan Ekonomi Daerah:** Menyusun kebijakan ekonomi daerah yang dapat mendorong daya saing dan investasi, serta mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata.

6. **Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan:** Mengidentifikasi dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi unggulan yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja.
7. **Fasilitasi Investasi dan Usaha Daerah:** Memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap investasi dan kegiatan usaha daerah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.
8. **Pengembangan Infrastruktur Ekonomi:** Merencanakan, mengembangkan, dan mengawasi pembangunan infrastruktur ekonomi (seperti jalan, energi, pasar, dan fasilitas pendukung lainnya) yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pembangunan daerah.
9. **Penyuluhan dan Sosialisasi Ekonomi:** Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program-program ekonomi daerah, kebijakan pembangunan, serta peluang usaha yang ada.
10. **Penyusunan Laporan Ekonomi dan Pembangunan:** Menyusun laporan berkala yang berisi evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan program ekonomi dan pembangunan, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.

## 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) dari Seksi Ketentraman dan Ketertiban:

Tugas Pokok:

Seksi Ketentraman dan Ketertiban bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi kegiatan yang berhubungan dengan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Seksi ini berperan dalam menciptakan kondisi yang aman, damai, dan tertib, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Fungsi:

1. **Penyusunan Kebijakan Ketentraman dan Ketertiban:** Menyusun kebijakan dan program yang bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban

masyarakat, baik di tingkat kelurahan, kecamatan, maupun daerah secara keseluruhan.

2. **Pemantauan dan Pengawasan Ketertiban Masyarakat:** Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kondisi ketertiban masyarakat untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan yang ada dipatuhi, serta mengidentifikasi potensi gangguan ketertiban yang dapat timbul.
3. **Penyelenggaraan Operasi Ketertiban:** Melakukan operasi ketertiban untuk menertibkan pelanggaran yang terjadi di masyarakat, seperti penertiban pedagang kaki lima, parkir liar, atau pelanggaran terhadap peraturan daerah lainnya.
4. **Pembinaan dan Penyuluhan Masyarakat:** Menyenggarakan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat terkait dengan pentingnya menjaga ketertiban dan ketentraman, serta mengedukasi masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam berpartisipasi menjaga keamanan lingkungan.
5. **Koordinasi dengan Aparat Keamanan:** Berkoordinasi dengan aparat kepolisian, TNI, serta instansi terkait lainnya dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah kerja. Ini termasuk penanganan kerusuhan sosial dan masalah yang berkaitan dengan keamanan.
6. **Pengelolaan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling):** Membina dan mengembangkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) di tingkat masyarakat guna meningkatkan partisipasi warga dalam menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan tempat tinggal mereka.
7. **Penanganan Keamanan dalam Keadaan Darurat:** Menangani situasi darurat atau keadaan luar biasa yang mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, seperti bencana alam, kerusuhan sosial, atau ancaman terhadap stabilitas keamanan.
8. **Penegakan Peraturan Daerah yang Berkaitan dengan Ketertiban:** Melaksanakan penegakan terhadap peraturan daerah yang berkaitan dengan ketertiban, seperti peraturan tentang kebersihan, pengaturan lalu lintas, peraturan daerah mengenai protokol kesehatan, dan lainnya.
9. **Penyelesaian Konflik Sosial:** Menangani dan menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di masyarakat melalui pendekatan mediasi, negosiasi, dan kerja sama dengan pihak terkait untuk menjaga kedamaian dan mencegah eskalasi masalah.

#### 10. Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan Ketentraman dan Ketertiban:

Menyusun laporan berkala mengenai kegiatan ketentraman dan ketertiban yang telah dilaksanakan, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan tersebut dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Kecamatan Kampak dipimpin oleh seorang Camat (Eselon III.A) dan dibantu oleh Sekretaris Kecamatan (Eselon III.B), 2 (Dua) orang Kasubag (Eselon IV.B) 1 (satu) Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian, 1 (orang) Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan dan 4 (empat) kepala seksi (Eselon IV.A) 2 (dua) orang Plt. Kasi Tata Pemerintahan dan Plt. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dibantu oleh sejumlah pengolah data, pengelola data, pengelola barang milik negara dan pengadministrasi.

Sumber daya manusia yang mendukung jalannya organisasi sebagaimana tersebut pada daftar nama Aparatur dibawah ini :

**Tabel 1**

**Nama Aparatur yang menjalankan organisasi Kecamatan Kampak keadaan sampai dengan akhir Desember 2025**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>PANGKAT / GOL.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KET</b>
1	Drs. Budi Priyono	Pembina (IV/a)	Plt. Camat	
2	Drs. Budi Priyono	Pembina (IV/a)	Sekretaris Camat	
3	Minarmi	Penata Muda Tk. I (III/b)	Plt. Kasi Kesra	
4	Buntaran	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasi Ekbang	
5	Imam Djoewaeni, S.Pd.	Pengatur Tk. I (III/c)	Plt. Kasi Tata Pemerintahan	
6	Samugi	Pengatur (II/c)	Plt. Kasi Trantibum	
7	Eko Widiyanto, S.SOS.	Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasubag Perencanaan,	

			Pelaporan dan Keuangan	
8	Bahnantoro, S.M.	Penata Muda (III/a)	Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian	
9	Paini	Penata Muda (III/a)	Staf	
10	Dian Tias Rini	Penata Muda (III/a)	Staf	
11	Prima Oktavia, S.I.P	Penata Muda (III/a)	Staf	
12	Laurel Lutfy Nur Fajri, S.I.P	Penata Muda (III/a)	Staf	
13	Sumarni	Pengatur Muda Tk. I (II/a)	Staf	

*Sumber Data : Buku Induk Kepegawaian Kec. Kampak Desember 2025*

Dari 12 (dua belas) tenaga PNS tersebut di atas berdasarkan tingkat pendidikan dapat dirinci sebagai berikut :

- 1) S – 2 : 0 orang
- 2) S – 1 : 6 orang
- 3) SLTA : 6 orang

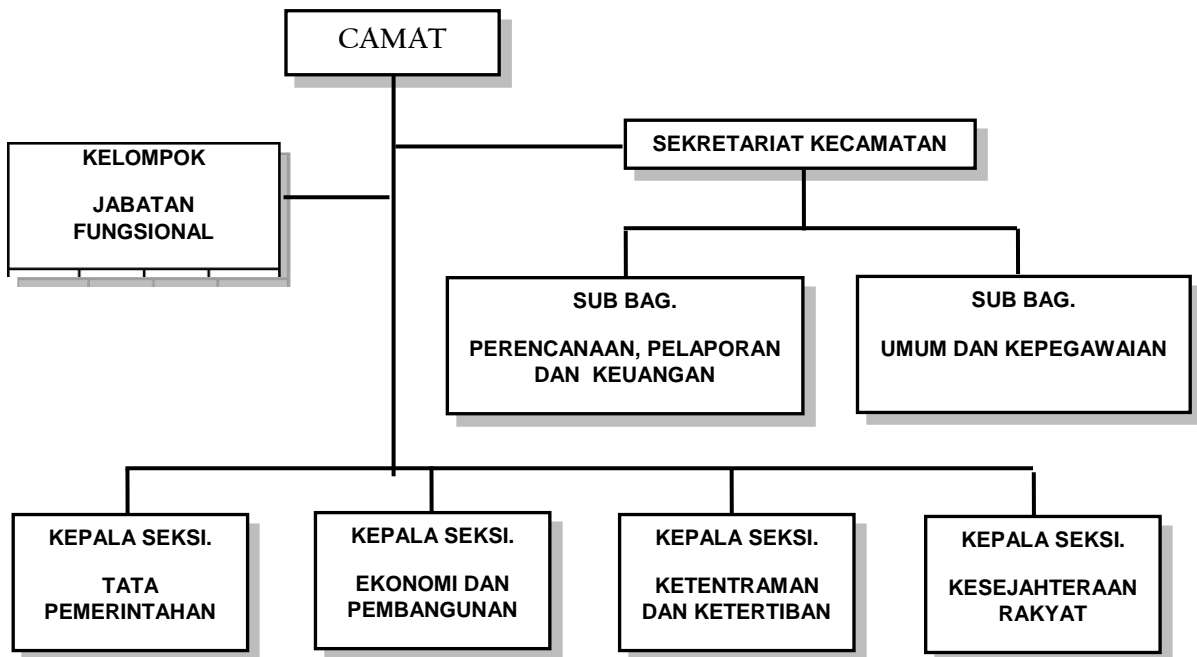
Adapun Struktur Organisasi Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Tugas Kecamatan Kabupaten Trenggalek disebutkan bahwa, susunan organisasi Kecamatan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Kampak

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Tugas Kecamatan Kabupaten Trenggalek disebutkan bahwa, susunan organisasi Kecamatan

- INSERT GAMBAR BAGAN SOTK -



Berdasarkan dengan SOTK diatas, struktur organisasi yang ada di Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat bisa ditambahkan mengenai tugas (textbook)
2. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6. Seksi Kesejahteraan Rakyat
7. Kelompok Jabatan Fungsional

### I.3. Isu – isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, dan telaah terhadap Renstra Kementerian Dalam Negeri, maka dirumuskan (berapa jumlah isu strategis) isu strategis Kecamatan Kampak yaitu :

- a. Kesekretariatan
- b. Pemerintahan dan Pelayanan Umum.
- c. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kesejahteraan Sosial
- d. Ketentraman dan Ketertiban Umum

**Tabel 1.4**

**Tabel permasalahan dan isu strategis Kecamatan Kampak**

Permasalahan		Isu Strategis	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesekretariatan :</li> <li>a. Agenda surat masuk/keluar.</li> <li>b. Administrasi Kepegawaian, yaitu buku harian PNS.</li> <li>c. Inventarisasi asset kantor.</li> <li>d. Pemeliharaan kantor.</li> <li>e. Renstra.</li> <li>f. RKT/program kerja.</li> <li>g. RKA/DPA.</li> <li>h. Laporan musrenbang Kecamatan.</li> <li>i. LAKIP</li> <li>- Telah terlaksana :</li> <li>a. perbendaharaan keuangan Kecamatan Kampak</li> <li>b. pendistribusian anggaran kegiatan.</li> <li>c. Laporan SPJ kegiatan.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah dan kompetensi SDM.</li> <li>b. Ketersediaan anggaran.</li> <li>c. Ketersediaan sarpras.</li> </ul> <p>Peraturan perundang-undangan terkait :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kepegawaian.</li> <li>b. asset.</li> <li>c. Renstra, RKT dan LKjIP.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemerintahan dan Pelayanan Umum:</li> <li>a. Pembinaan administrasi Desa.</li> <li>b. Laporan /pemutakhiran data</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keterbatasan dan kompetensi SDM.</li> <li>b. Keterbatasan anggaran.</li> </ul>

<p>kependudukan.</p> <p>c. Pembinaan aparatur Desa.</p> <p>d. Monitoring penyusunan APBDesa.</p> <p>e. Monitoring ADD.</p> <p>f. Pengolahan RKPDesa, LKPD dan LPPD Desa.</p> <p>g. Pembinaan penyelenggaraan Pemdes.</p> <p>h. Pembinaan BPD.</p>	<p>c. Keterbatasan sarpras.</p> <p>d.Kesiapan Pemdes.</p> <p>e. Rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan identitas diri.</p> <p>f. Ketersediaan anggaran.</p> <p>g. Ketersediaan sarpras.</p>
<p>Telah terlaksana :</p> <p>a. Pembinaan LPM.</p> <p>b. Pendataan swadaya murni masyarakat.</p> <p>c. Pembinaan PKK.</p> <p>d. Pembinaan dan pendataan Pokmas Desa (UED/TTG).</p> <p>e. Pelaksanaan kegiatan PNPM.</p> <p>f. Pembinaan BUMDesa.</p> <p>g. Pembinaan Gakin.</p> <p>h. Pembinaan KB.</p> <p>i. Pendataan masyarakat penyandang masalah sosial.</p> <p>j. Pembinaan pasar Desa.</p> <p>k. Pembinaan Koperasi.</p> <p>l. Pembinaan karang taruna/pemuda dan lansia.</p> <p>m. pembedayaan perempuan dan perlindungan anak.</p> <p>n. distribusi raskin.</p> <p>o. keluarga harapan.</p>	<p>a. Keterbatasan dan kompetensi SDM.</p> <p>b. Keterbatasan anggaran.</p> <p>c. Keterbatasan sarpras.</p> <p>d. kurang diakomodirnya kepentingan kaum marjinal.</p> <p>e. Kurang Koordinasi dengan pelaksana PNPM.</p> <p>f. Kurang Kesiapan lembaga Desa.</p> <p>g. Kurang Koordinasi Kerja sama dengan Dinkes, DinsosP3A, Diskoperindag, Kesbangpolinmas, Bapemas dan Pemdes,.</p>
<p>Ketentraman dan Ketertiban Umum :</p> <p>a. Pemantauan dan pengendalian trantibum kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman.</p> <p>b. Pendataan dan pembinaan</p>	<p>a. Keterbatasan dan kompetensi SDM.</p> <p>b. Keterbatasan anggaran.</p> <p>c. Keterbatasan sarpras.</p> <p>d. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara</p>

	Linmas. c.Pendataan penyelenggaraan Trantibum		trantibum. e. Lokasi potensi rawan bencana alam dan Bencana Sosial  e. Koordinasi dengan Satpol PP, Dinas Sosial P3A dan Kesbangpolinmas.
--	--	--	--

#### **1.4. Landasan Hukum**

Peraturan-peraturan yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan tentang RPJMD
8. Peraturan tentang SOTK dan Tusi Perangkat Daerah

## **I.5. Sistematika Penulisan**

Laporan Kinerja Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek disusun berdasarkan sistematika penulisan, sebagai berikut :

- **Bab I                   Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang latar belakang dan landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja, gambaran umum perangkat daerah, dan isu-isu strategis yang diampu perangkat daerah.

- **Bab II                   Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja serta Anggaran Tahun 2024.

- **Bab III                 Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2024, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

- **Bab IV                 Penutup**

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

### **Lampiran:**

- a. Matriks Renstra 2025 - 2029
- b. Perjanjian Kinerja (PK) Induk dan Perubahan 2025

## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

### II.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Kampak berdasarkan perjanjian kinerja serta diselaraskan dengan dokumen Renstra 2021-2026 dan Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 5 tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Trenggalek tahun 2021-2026 Sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen tersebut Visi Kabupaten Trenggalek adalah :

**“Terwujudnya Kabupaten Trenggalek Yang Maju Melalui Ekonomi Inklusif, Sumber Daya Manusia Kreatif Dan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)”**

Visi tersebut mengandung pengertian sebagai berikut :

**~ MAJU**

Terwujudnya masyarakat Trenggalek yang unggul dan berdaya saing, berperadaban, profesional mampu mengoptimalkan potensi daerah, dengan didasari produktifitas, kreativitas, kerjasama yang sinergis dan inovasi serta menampilkan keunggulan dan prestasi.

**~ EKONOMI INKLUSIF**

Pemulihan Ekonomi pasca Pandemi Covid – 19 melalui penciptaan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan dalam rangka peningkatan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.

**~ SDM KREATIF**

SDM yang mampu menciptakan ide atau gagasan yang baru, memiliki jiwa profesional dengan tetap menjunjung identitas dan budaya yang baik, memiliki kepercayaan diri

dan etos kerja yang baik, serta prinsip kebersamaan dan gotong royong sebagai watak masyarakat Trenggalek.

#### ~ **PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Pembangunan yang mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang dimiliki dengan didukung SDM Kreatif untuk pemenuhan kebutuhan hidup masa sekarang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan (*environmental carrying capacity*) yang dapat tetap menjamin kelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan sebagai ruang ekologi.

Dalam mewujudkan visi maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan diatas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Adapun misi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memastikan UMKM Naik Kelas serta Membangun Tata Niaga Sektor Pertanian dan Perikanan yang Inklusif, Mendorong Investasi, Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Menciptakan Wirausahawan Baru yang Berorientasi Pada Langkah Pengentasan Kemiskinan dan Ekonomi Pesantren.

2. Mewujudkan Trenggalek sebagai Kota Pariwisata Berbasis Kolaborasi dan Berkelanjutan Dimulai dari Pemberdayaan Masyarakat Desa;
3. Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender dalam Rangka Memastikan Pelayanan yang Prima, Khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan Berbasis *Big Data* (Satu Data Besar); dan
4. Mewujudkan Infrastruktur yang Handal dan Berwawasan Lingkungan.

Terhadap Misi Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kampak mendukung pada misi berikut :

- Misi ke tiga yaitu :  
Mewujudkan Pemerintahan Kolaboratif dan Mengarusutamakan Gender dalam rangka Memastikan Pelayanan Prima khususnya Pelayanan Adminduk, Pendidikan dan Kesehatan berbasis *Big Data* (Satu Data Besar).

Sesuai amanat tersebut maka Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek sebagai Perangkat Daerah pada Tahun 2025 ini telah melaksanakan program kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditindak lanjuti dengan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025. Laporan Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Kampak merupakan dokumen pelaporan kinerja pemerintah dalam jangka 1 (satu) tahun berjalan yang dilaksanakan sebagai evaluasi dan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja yang sudah dicapai oleh Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

**Tabel 2. 1**  
**Matriks Perencanaan Kinerja Kecamatan Kampak**  
**Tahun 2025**

Tujuan / Sasaran / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Target 2025 dan Satuan
Tujuan : Terwujudnya Birokrasi yang Berkualitas	Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	85,29 (A)
Sasaran : Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Kolaboratif dan Akuntabel, Meningkatnya Birokrasi yang bersih dan melayani	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  Persentase kasus konflik antar warga yang ditangani dan ditindaklanjuti	100 %
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>	<b>Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi</b>	<b>100 %</b>
	<b>Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 %</b>
	<b>Persentase nilai aset dalam kondisi baik</b>	<b>100 %</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun</b>	<b>70 Dokumen</b>
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan</b>	<b>100 %</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang / bulan
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	217 Dokumen

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38 Laporan
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 Laporan
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan</b>	<b>100 %</b>
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Dokumen
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan</b>	<b>100 %</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan</b>	<b>100 %</b>
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan</b>	<b>100 %</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara</b>	<b>100 %</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>
<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>	<b>Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun</b>	<b>2 Dokumen</b>
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan
<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun</b>	<b>24 Dokumen</b>
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan

<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan</b>	<b>100 %</b>
<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyakat di wilayah kecamatan</b>	<b>4 Laporan</b>
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Konflik yang ditindaklanjuti</b>	<b>100 %</b>
<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun</b>	<b>10 Dokumen</b>
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>
<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan</b>	<b>12 Dokumen</b>
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen

## II.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kampak berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2026, terdiri dari 2 (dua) tujuan dan 2 (dua) sasaran, dengan masing- masing mempunyai 1 (satu) indikator, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 2. 2**  
**Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek**

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formula	Sumber Data	Penanggung jawab
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	Nilai SAKIP merupakan hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (Auditor Inspektorat). Hasil evaluasi /Nilai SAKIP Perangkat Daerah release pada bulan Agustus	Jumlah Nilai Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	Inspektorat	Camat
Meningkatnya Layanan Publik secara Kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai IKM merupakan angka yang diperoleh dari hasil survey Kepuasan Masyarakat yang diberikan oleh penerima layanan yang diberikan kepada Perangkat Daerah secara online melalui tautan <a href="https://skm.trenggalekkab.go.id">https://skm.trenggalekkab.go.id</a>	Menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Hasil Survey/ Kuisisioner	Camat

### II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target, program dan anggaran. Target kinerja merepresentasikan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat outcome

Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah pada tahun 2025 mengalami 1 (kali) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Plt. Camat Kampak Kabupaten Trenggalek pada tanggal 2 bulan Januari 2025, kemudian dilakukan revisi pada tanggal 3 bulan September 2025. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah:

- a. Perubahan strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran
- b. Adanya perubahan Perubahan prioritas atau asumsi yang berdampak signifikan pada pencapaian tujuan dan sasaran
- c. Sepanjang tahun 2025, Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah mengalami satu kali perubahan. Dokumen yang awalnya disahkan oleh Plt. Camat Kampak, Kabupaten Trenggalek pada Januari 2025 tersebut direvisi pada bulan September 2025. Perubahan ini didasarkan pada penyesuaian anggaran APBD serta rasionalisasi target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari 94,00 menjadi 90,00 guna mengoreksi indikasi *over value* pada penilaian sebelumnya.

**Tabel 2. 3**

**Perbandingan Perjanjian Kinerja Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Tahun 2025  
Sebelum dan Sesudah Perubahan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Perubahan
	Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Katagori Nilai) SAKIP	82	86,20
	Meningkatnya Layanan Publik Secara Kolaboratif	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat	94	90

#### **II.4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025**

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, berikut ini disajikan besaran pagu anggaran serta perubahannya yang menjadi dasar penyusunan laporan kinerja ini sebagai berikut :

**Tabel 2. 4**

**Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025**

Program / Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Tagging PPRG
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	2.249.343.747,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.146.095.078,00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	50.100,00	

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50.100,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	19.674.989,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	47.903.580,00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.569.900,00	
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	59.750.495,00	V
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22.000.000,00	V
<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	2.039.232,00	V
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.039.232,00	V
<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	6.431.810,00	V
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.431.810,00	V
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	8.692.099,00	V
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.692.099,00	V
<b>JUMLAH</b>	<b>2.326.257.383,00</b>	

**Ket :** √ Adalah dalam konteks kebijakan publik dan pengarusutamaan Gender (PUG) dengan anggaran yang di Perencanaan, dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dengan analisis Gender dengan *Gender Analisis Pathway* (GAP/alat analisis PPRG)) dan anggaran yang di *Gender Action Budget* (GAB/Anggaran rencana aksi Gender).

Pada tahun anggaran 2025, Kecamatan Kampak telah mengimplementasikan Strategi Pengarusutamaan Gender melalui 4 (empat) program kerja yang mendukung Anggaran Responsif Gender (ARG). Program-program teknis tersebut dirancang untuk memperkuat peran Kecamatan sebagai unsur kewilayahan dalam mewujudkan kesetaraan serta keadilan gender yang nyata di masyarakat.

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### III.1. Pengukuran Kinerja 2025

Kinerja Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek tahun 2025 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kecamatan Kampak Tahun 2025. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Kampak merupakan kinerja tahun ke – 5 pada periode Renstra Kecamatan Kampak

Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2025 adalah sebesar 100 % yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 1 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2025 Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Tahun 2025	Capaian (%)
				I	II	III	IV		
1	KECAMATAN KAMPAK	Nilai SAKIP	86,20	0	0	85,29	0	94,71	94,71
1.1	KECAMATAN	IKM	90	100	100	100	100	92,51	100
1.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	26.34 %	26.79 %	88.00 %	110 %	100 %	100 %
1.1.2		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	107.14 %	23.44 %	23.44 %	23.44 %	100 %	100 %

1.1.3		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	98.17 %	103.27 %	96.82 %	103.17 %	100 %	100 %
1.1.3.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	64 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	19 Dokumen	64 Dokumen	64 Dokumen
1.1.3.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	4 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	4 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen
1.1.3.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan	11 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	15 Laporan	46 Laporan	46 Laporan
1.1.3.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	23.78 %	24.65 % %	29.24 %	22.33 %	100 %	100 %
1.1.3.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/ bulan	10 Orang/ bulan	12 Orang/ bulan	12 Orang/ bulan	12 Orang/ bulan	12 Orang/ bulan	12 Orang /bulan
1.1.3.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47 Dokumen	10 Dokumen	12 Dokumen	16 Dokumen	9 Dokumen	47 Dokumen	47 Dokumen
1.1.3.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	315 Dokumen	68 Dokumen	75 Dokumen	87 Dokumen	85 Dokumen	315 Dokumen	315 Dokumen
1.1.3.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	33 Laporan	9 Laporan	8 Laporan	10 Laporan	6 Laporan	33 Laporan	33 Laporan

1.1.3.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan	100 %	61.54 %	37.04 % %	14.81 %	37.04 %	100 %	100 %
1.1.3.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 Laporan	8 Laporan	10 Laporan	4 Laporan	5 Laporan	27 Laporan	27 Laporan
1.1.3.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	35.14 %	27.03 % %	27.03 %	10.80 %	100 %	100 %
1.1.3.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	37 Dokumen	13 Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen	4 Dokumen	37 Dokumen	37 Dokumen
1.1.3.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	21.43 %	28.57 % %	25 %	25 %	100 %	100 %
1.1.3.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 Paket	4 Paket
1.1.3.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 Paket	4 Paket
1.1.3.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 Paket	4 Paket
1.1.3.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	4 Paket	4 Paket
1.1.3.5.5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	0 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	4 Paket	4 Paket
1.1.3.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
1.1.3.5.7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen

1.1.3.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	0 %	0.00 %	0 %	0 %	0 %	0 %
1.1.3.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0.00 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit
1.1.3.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	25.00 %	26.92 %	26.92 %	21.16 %	100 %	100 %
1.1.3.7.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	36 Laporan	36 Laporan
1.1.3.7.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
1.1.3.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	2 Laporan	13 Laporan	13 Laporan
1.1.3.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	2.08 %	25 %	18.75 %	54.17 %	100 %	100 %
1.1.3.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	1 Unit	6 Unit	3 Unit	2 Unit	12 Unit	12 Unit
1.1.3.8.2	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
1.1.3.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	0 Unit	4 Unit	4 Unit

1.1.3.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
1.1.4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	62.50 %	12.50 %	12.50 %	12.50 %	100 %	100 %
1.1.4.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen
1.1.4.1.1	Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
1.1.4.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	24 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen
1.1.4.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen
1.1.4.2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	6 Laporan	3 Laporan	15 Laporan	15 Laporan
1.1.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	25.00 %	25 %	25 %	25 %	100 %	100 %

1.1.5.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
1.1.5.1.1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
1.1.6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1.1.6.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang disusun	24 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen
1.1.6.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
1.1.6.1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	12 Laporan	12 Laporan
1.1.7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	25 %	25 %	25 %	25 %	100 %	100 %
1.1.7.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	24 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	24 Dokumen	24 Dokumen
1.1.7.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen

1.1.7.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen
Rata-rata capaian kinerja (%)				34,82	52,04	72,38	92,73	62,99	100,00%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak satu target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak satu target;
- 3) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak satu target;
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak nol target.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas tercapai target dapat tercapai karena antara pimpinan dan staf bersinergi untuk mensukseskan realisasi kinerja dan realisasi anggaran.

Secara umum, dapat kami sampaikan beberapa faktor pendorong maupun faktor penghambat yang dapat diidentifikasi dalam rangka mencapai target sasaran yang telah diperjanjikan. Faktor – faktor tersebut antara lain sebagai berikut :

**A. Faktor pendorong :**

- Kepemimpinan yang kuat
- Kerjasama yang baik
- Kualitas input yang baik
- Budaya Organisasi yang baik
- Koordinasi yang baik antara pimpinan dan pelaksana

**B. Kendala/tantangan yang ditemui :**

- Hampir tidak ditemui kendala selain SDM yang banyak mendekati usia pensiun sehingga motivasi bekerja kurang maksimal
- Minim nya sarana dan prasarana yang memadai

### III.2. Analisis Capaian Kinerja

**Tabel 3.2**  
**Analisis Capaian Kinerja Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra ( 2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra ( 2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra ( 2026)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	81 (A)	81 (A)	83 (A)	84,00 (A)	90 (AA)	90 (AA)	83,85 (A)	84,83 (A)	86,14 (A)	87,48 (A)	85,29	86,25	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	93,00	93,00	93,00	93,00	94,00	99,90	92,12	90,50	99,49	99,84	99,86	90,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-

Pada tabel 3.2 dapat kami sajikan informasi sebagai berikut :

1. Penetapan target Tahun 2025 mengacu pada capaian kinerja Tahun 2024 ( Target tidak mengacu pada dokumen perencanaan/Renstra karena pada tahun yang bersangkutan telah tercapai ); dan
2. Penetapan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 telah disesuaikan capaian kinerja Tahun 2024.

### III.2.1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan tata kelolapemerintahan yang efektif dan efisien pada Kecamatan Kampak

Tabel 3. 2.1 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra ( 2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra ( 2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra ( 2026)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	81 (A)	81 (A)	83 (A)	84,00 (A)	90 (AA)	90 (AA)	83,85 (A)	84,83 (A)	86,14 (A)	87,48 (A)	85,29	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-

**Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran pada Kecamatan Kampak adalah :**

(1) Telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi dari evaluator internal sesuai aturan dan jadwal yang telah ditentukan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

NO	URAIAN REKOMENDASI	URAIAN TINDAK LANJU	HASIL			KETERANGAN	LINK BUKTI
			TS	TB	BT		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Atas evaluasi perencanaan kinerja agar semua pegawai dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung kinerja yang akan dicapai serta hasil reviu Renstra yang dilakukan berkala mampu menunjukkan kondisi yang lebih baik (terdapat inovasi)	Capaian Renja Tribulanan dan Merangsang Tumbuhnya Inovasi Dalam Mencapai Kinerja	V				<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CaNm53wnCXQ0o3nyFIGmMGoofK8A-Hol/edit?usp=sharing&amp;oid=102060091591577390179&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CaNm53wnCXQ0o3nyFIGmMGoofK8A-Hol/edit?usp=sharing&amp;oid=102060091591577390179&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>
2	Atas evaluasi pengukuran kinerja agar:  a) Defisini operasional mampu menjelaskan kinerja yang ingin dicapai dan mekanisme pengukuran indikator kinerja  b) Pedoman mekanisme pengumpulan data kinerja harus dapat diandalkan yaitu SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up date, kemudahan penelusuran sumber daya yang valid, terdapat kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan, terdapat penanggungjawab yang jelas dan jelas waktu pengumpulan  c) Pengukuran kinerja digunakan secara optimal sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment serta penyesuaian strategis dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	Diadakan Perbaikan Sesuai Indikator Kerja  Dilakukan Up-Date Sesuai Dengan Kondisi Yang Sekarang  Diupayakan Pengumpulan Dalam Pemberian Reward dan Punishment	V  V  V				<a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y1bfZ5f7KvSwW3qNS_YIWfQ6W17uG_F/edit?usp=sharing&amp;oid=102060091591577390179&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y1bfZ5f7KvSwW3qNS_YIWfQ6W17uG_F/edit?usp=sharing&amp;oid=102060091591577390179&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>  <a href="https://drive.google.com/file/d/1jwfrKEnuLUTUvHzcoQhMHaZeCpNbGUL6/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1jwfrKEnuLUTUvHzcoQhMHaZeCpNbGUL6/view?usp=sharing</a>  <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ySgxBcl1m93IY190PtAe0NsiklqkNZt/edit?usp=sharing&amp;oid=102060091591577390179&amp;rtpof=true&amp;sd=true">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ySgxBcl1m93IY190PtAe0NsiklqkNZt/edit?usp=sharing&amp;oid=102060091591577390179&amp;rtpof=true&amp;sd=true</a>

3	Atas evaluasi pelaporan kinerja agar pemanfaatan informasi kinerja memberikan dampak bagi pegawai, penyesuaian aktivitas, penyesuaian anggaran, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja dan penyesuaian perencanaan kinerja berikutnya.	Dilaksanakannya Pembinaan Secara Berkala Perbaikan Atas Hasil Evaluasi Kinerja	V				<a href="https://drive.google.com/drive/folders/12tRhcRCsxykg0hFNQ-Nhhy7ega5FnUTb?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/12tRhcRCsxykg0hFNQ-Nhhy7ega5FnUTb?usp=sharing</a>
4	Atas evaluasi-evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar;  a) Melaksanakan upaya peningkatan SDM, pendalaman evaluasi dan dukungan sarana teknologi internal dalam evaluasi akuntabilitas kinerja  b) Informasi mengenai capaian kinerja didukung dengan data-data kinerja yang dapat diandalkan yaitu data kinerja diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid, dihasilkan dari sumber-sumber atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten), dapat ditelusuri sumber datanya, dapat diverifikasi dan up to date.	Akan Diupayakan Peningkatan Dalam Bentuk Pengendalian Laporan Kinerja Setiap ASN  Capaian kinerja setiap semester Renja yang up to date	V  V				<a href="https://drive.google.com/file/d/1-3geeaBnaabgv4YqiNyZ-al-0VXgn2Qg/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1-3geeaBnaabgv4YqiNyZ-al-0VXgn2Qg/view?usp=sharing</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/12tRhcRCsxykg0hFNQ-Nhhy7ega5FnUTb?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/12tRhcRCsxykg0hFNQ-Nhhy7ega5FnUTb?usp=sharing</a>  <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1TL5wbuliisW8oyTas_pFDTEDRs1_lT8J?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1TL5wbuliisW8oyTas_pFDTEDRs1_lT8J?usp=sharing</a>

- (2) Menentukan target kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Memiliki indikator kinerja yang jelas
- (4) Memiliki disiplin kinerja yang tinggi
- (5) Memiliki pimpinan yang baik
- (6) Memiliki Lingkungan kerja yang kondusif
- (7) Memiliki sarana dan prasarana yang memadai
- (8) Memiliki budaya kerja yang baik

**Kendala/tangganan yang ditemui :**

- (1) Hampir tidak ditemui kendala selain SDM yang banyak mendekati usia pensiun sehingga motivasi bekerja kurang maksimal
- (2) Kurangnya manajemen waktu
- (3) Kurangnya Skill yang sesuai dengan job desk

**III.2.2.1 Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan layanan publik secara kolaboratif pada Kecamatan Kampak**

**Tabel 3. 2.2.1 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2024**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra ( 2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra ( 2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra ( 2026)
Meningkatkan layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	93,00	93,00	93,00	94,00	99,87	99,90	92,12	90,50	99,49	99,84	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Inovasi “BERAS KAMPAK” **BERSIH** dan **ASRI**, **KOOPERATIF**, **ADIL**, **MUDAH**, **PROFESIONAL**, **NYAMAN**, **KETULUSAN**.
- (2) Pemanfaatan TI

- (3) Pelayanan sesuai SP dan SOP
- (4) Menentukan target kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan;
- (5) Rencana Strategis akan membantu dalam menentukan arah dan tujuan yang dicapai
- (6) Mengukur kinerja akan membantu mengetahui seberapa tepat pegawai telah menjalankan fungsinya.
- (7) Memahami potensi dan kemampuan yang ada akan membantu dalam melakukan aktifitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah (Jika ada) :

- (1) Kurangnya Sumber daya manusia (SDM)
- (2) Perencanaan kegiatan tidak bisa dilaksanakan tepat waktu
- (3) Kurangnya Koordinasi antar lintas sectoral

### III.2.2.2 Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Tabel 3. 2.2.2 Perbandingan Target Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						Realisasi						Capaian (%)					
		2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra ( 2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra ( 2026)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi pada Akhir Pereode Renstra ( 2026)
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	81 (A)	81 (A)	83 (A)	84,00 (A)	90 (AA)	90 (AA)	83,85 (A)	84,83 (A)	86,14 (A)	87,48 (A)	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-
Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	93,00	93,00	93,00	93,00	94,00	99,90	92,12	90,50	99,49	99,84	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-

Faktor yang menunjang keberhasilan capaian realisasi sasaran adalah :

- (1) Menentukan target kinerja yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan
- (2) Memiliki rencana strategis
- (3) Memiliki Indikator kinerja

- (4) Memiliki pagu realisasi anggaran yang terkait pencapaian target sasaran
- (5) Memiliki ketepatan pegawai dalam menjalankan fungsinya
- (6) Memiliki partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya

Faktor penghambat capaian realisasi sasaran adalah (Jika ada) :

- (1) Keterbatasan ASN dikarenakan usia yang sudah mendekati purna tugas
- (2) Perencanaan Kegiatan yang tidak dapat dilakukan tepat waktu
- (3) Kurangnya koordinasi antar lintas sector
- (4) Kurangnya

Sebagai Organisasi Perangkat daerah Kecamatan Kampak berusaha selalu meningkatkan Kinerja dalam hal pelayanan langsung pada Masyarakat dari yang paling bawah dengan tujuan untuk mencapai Pelayanan Prima (*Good Governance*).

**Tabel 3. 4 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	100 %	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Persentase nilai aset dalam kondisi baik	99,84%	Menunjang
					Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Barang Milik Daerah yang disusun	100%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100%	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang dipelihara	100%	Menunjang
2	Meningkatnya Layanan Publik secara kolaboratif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,00 %	<b>Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan</b>	100%	Menunjang
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	100%	Menunjang
				<b>Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Konflik yang ditindaklanjuti</b>	100%	Menunjang
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	100%	Menunjang
				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan</b>	100,00%	Menunjang

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Presentase Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang disusun	100%	Menunjang
				<b>Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu</b>	100%	Menunjang
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	100%	Menunjang

### III.3. Realisasi Anggaran

Anggaran Kecamatan Kampak tahun 2025 adalah sebesar Rp. 2.326.257.383,00 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp. 1.697.541.258,00 atau sebesar 72,97 %. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3. 5 Realisasi Anggaran Tahun 2025 Kecamatan Kampak**

<b>Program / Kegiatan</b>	<b>Anggaran (Rp.)</b>	<b>Realisasi (Rp.)</b>	<b>Persentase (%)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp2.249.343.747,00	Rp1.621.920.258,00	72,11%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp3.000.000,00	Rp2.948.000,00	98,27%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.146.095.078,00	Rp1.522.952.456,00	70,96%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp50.100,00	Rp50.000,00	99,80%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp50.100,00	Rp47.500,00	94,81%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp19.674.989,00	Rp19.294.048,00	98,06%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp0,00	Rp0,00	#DIV/0!
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp47.903.580,00	Rp46.194.850,00	96,43%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp32.569.900,00	Rp30.433.404,00	93,44%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp59.750.495,00	Rp58.586.500,00	98,05%

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp22.000.000,00	Rp20.954.000,00	95,25%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rp2.039.232,00	Rp2.031.000,00	99,60%
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp2.039.232,00	Rp2.031.000,00	99,60%
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp6.431.810,00	Rp6.371.500,00	99,06%
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp6.431.810,00	Rp6.371.500,00	99,06%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp8.692.099,00	Rp8.632.000,00	99,31%
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp8.692.099,00	Rp8.632.000,00	99,31%
<b>TOTAL</b>	<b>Rp2.326.257.383</b>	<b>Rp 1.697.541.258</b>	<b>72,97%</b>

**Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran Kecamatan Kampak**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (Kategori Nilai) SAKIP	<b>86,20 (A)</b>	<b>85,29 ( A)</b>	<b>93,71%</b>	<b>2.149.095.078</b>	<b>1.525.900.456</b>	<b>71,00</b>
2.	Meningkatnya Layanan Publik secara kolaboratif	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	<b>90</b>	<b>99,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>59.750.495</b>	<b>58.586.500</b>	<b>98,05</b>

**Tabel 3. 7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran**  
**Pilihan 1 : Jika Indikator Sasaran Hanya 1 (satu) Tahun 2024**

No.	Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran	
1	KECAMATAN KAMPAK		100	97,73	97,73	2.092.827.114,00	2.012.372.279,00	96,16%	3,84%
2	KECAMATAN		100	97,73	97,73	2.092.827.114,00	2.012.372.279,00	96,16%	3,84%
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	100 %	100,00	2.005.804.342,00	1.937.072.429,00	96,57%	3,43%
		Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100,00				
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	99,88 %	99,88				
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	70 Dokumen	66 Dokumen	94,29	3.000.000,00	2.912.000,00	97,07%	2,93%
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	16 Dokumen	100,00	1.500.000,00	1.447.000,00	96,47%	3,53%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan	46 Laporan	100,00	1.500.000,00	1.465.000,00	97,67%	2,33%

7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	100,00	1.872.085.385,00	1.807.099.958,00	96,53%	3,47%
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang / bulan	13 Orang / bulan	76,47	1.824.041.634,00	1.759.075.458,00	96,44%	3,56%
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	40 Dokumen	40 Dokumen	100,00	47.043.751,00	47.040.000,00	99,99%	0,01%
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	217 Dokumen	100 Dokumen	100,00	500.000,00	485.500,00	97,10%	2,90%
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38 Laporan	38 Laporan	100,00	500.000,00	499.000,00	99,80%	0,20%
12	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan	100 %	100 %	100,00	500.000,00	483.000,00	96,60%	3,40%
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 Laporan	27 Laporan	100,00	500.000,00	483.000,00	96,60%	3,40%
14	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	100,00	500.000,00	498.000,00	99,60%	0,40%
15	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	50 Dokumen	50 Dokumen	100,00	500.000,00	498.000,00	99,60%	0,40%
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	100,00	39.390.970,00	38.391.350,00	97,46%	2,54%
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100,00	1.000.000,00	976.500,00	97,65%	2,35%

18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100,00	6.569.547,00	6.543.150,00	99,60%	0,40%
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100,00	2.475.159,00	2.346.500,00	94,80%	5,20%
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100,00	1.700.000,00	1.622.700,00	95,45%	4,55%
21	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100,00	3.700.000,00	3.632.000,00	98,16%	1,84%
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100,00	23.746.264,00	23.075.500,00	97,18%	2,82%
23	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	200.000,00	195.000,00	97,50%	2,50%
24	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	26 %	26,00	5.225.455,00	5.180.000,00	99,13%	0,87%
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100,00	5.225.455,00	5.180.000,00	99,13%	0,87%
26	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	100,00	51.114.200,00	49.575.881,00	96,99%	3,01%
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	100,00	13.222.600,00	12.144.972,00	91,85%	8,15%
28	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100,00	200.000,00	192.000,00	96,00%	4,00%
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	100,00	37.691.600,00	37.238.909,00	98,80%	1,20%
30	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	100,00	33.988.332,00	32.932.240,00	96,89%	3,11%

31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	100,00	26.768.068,00	26.038.740,00	97,28%	2,72%
32	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	100,00	500.000,00	485.000,00	97,00%	3,00%
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	100,00	4.074.000,00	3.920.000,00	96,22%	3,78%
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100,00	2.646.264,00	2.488.500,00	94,04%	5,96%
35	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	100,00	41.248.227,00	39.695.600,00	96,24%	3,76%
36	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	22.340.000,00	21.219.600,00	94,98%	5,02%
37	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	100,00	22.340.000,00	21.219.600,00	94,98%	5,02%
38	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	24 Dokumen	21 Dokumen	87,50	18.908.227,00	18.476.000,00	97,71%	2,29%
39	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	1.000.000,00	976.500,00	97,65%	2,35%

40	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	17.908.227,00	17.499.500,00	97,72%	2,28%
41	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	100,00	8.000.000,00	3.934.000,00	49,18%	50,83%
42	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyakat di wilayah kecamatan	4 Laporan	4 Laporan	100,00	8.000.000,00	3.934.000,00	49,18%	50,83%
43	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	4 Laporan	100,00	8.000.000,00	3.934.000,00	49,18%	50,83%
44	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100,00	8.774.545,00	8.693.500,00	99,08%	0,92%
45	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	100,00	8.774.545,00	8.693.500,00	99,08%	0,92%
46	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	5.000.000,00	4.949.500,00	98,99%	1,01%
47	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	4 Laporan	100,00	3.774.545,00	3.744.000,00	99,19%	0,81%
48	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	100,00	29.000.000,00	22.976.750,00	79,23%	20,77%

49	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	12 Dokumen	18 Dokumen	100,00	29.000.000,00	22.976.750,00	79,23%	20,77%
50	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	24.000.000,00	18.508.500,00	77,12%	22,88%
51	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	5.000.000,00	4.468.250,00	89,37%	10,64%

**Pilihan 2 : Jika Indikator Sasaran lebih dari 1 Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target (%)	Realisasi (%)	Persentase Capaian (%)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (Rp)	
1	KECAMATAN KAMPAK		100	92,51	92,51%	2.326.257.383,00	1.697.482.258,00	72,97%	27,03%
2	KECAMATAN		100	92,51	92,51%	2.326.257.383,00	1.697.482.258,00	72,97%	27,03%
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan pelayanan jasa administrasi perkantoran yang difasilitasi	100 %	100 %	100,00%	2.249.343.747,00	1.621.861.258,00	72,10%	27,90%

	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100,00%				
		Persentase nilai aset dalam kondisi baik	100 %	96,82 %	96,82%				
4	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	64 Dokumen	64 Dokumen	100,00	3.000.000,00	2.948.000,00	98,27%	1,73%
5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18 Dokumen	18 Dokumen	100,00	1.500.000,00	1.479.000,00	98,60%	1,40%
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46 Laporan	46 Laporan	100,00	1.500.000,00	1.469.000,00	97,93%	2,07%
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	100,00	2.146.095.078,00	1.522.952.456,00	70,96%	29,04%

8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	100,00	2.098.595.078,00	1.475.942.956,00	70,33%	29,67%
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	47 Dokumen	47 Dokumen	100,00	43.500.000,00	43.027.500,00	98,91%	1,09%
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	315 Dokumen	315 Dokumen	100,00	2.000.000,00	1.986.000,00	99,30%	0,70%
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	33 Laporan	33 Laporan	100,00	2.000.000,00	1.996.000,00	99,80%	0,20%
12	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dilaksanakan	100 %	100 %	100,00	50.100,00	50.000,00	99,80%	0,20%
13	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	27 Laporan	27 Laporan	100,00	50.100,00	50.000,00	99,80%	0,20%
14	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	100,00	50.100,00	47.500,00	94,81%	5,19%

15	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	37 Dokumen	37 Dokumen	100,00	50.100,00	47.500,00	94,81%	5,19%
16	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	100,00	19.674.989,00	19.235.048,00	97,76%	2,24%
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100,00	1.500.000,00	1.487.500,00	99,17%	0,83%
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100,00	4.321.549,00	4.268.049,00	98,76%	1,24%
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100,00	2.000.000,00	1.921.000,00	96,05%	3,95%
20	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100,00	500.200,00	498.500,00	99,66%	0,34%
21	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	100,00	4.038.700,00	3.966.999,00	98,22%	1,78%
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	100,00	6.314.540,00	6.095.000,00	96,52%	3,48%

23	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	1.000.000,00	998.000,00	99,80%	0,20%
24	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang diselesaikan	100 %	0 %	100,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
25	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	100,00	0,00	0,00	0,00%	100,00%
26	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diselesaikan	100 %	100 %	100,00	47.903.580,00	46.194.850,00	96,43%	3,57%
27	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	100,00	12.971.380,00	11.695.378,00	90,16%	9,84%
28	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	205.400,00	204.000,00	99,32%	0,68%
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	13 Laporan	100,00	34.726.800,00	34.295.472,00	98,76%	1,24%
30	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	100 %	100 %	100,00	32.569.900,00	30.433.404,00	93,44%	6,56%

31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	100,00	27.685.700,00	25.640.904,00	92,61%	7,39%
32	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 Unit	2 Unit	100,00	185.300,00	184.000,00	99,30%	0,70%
33	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	100,00	4.579.200,00	4.490.000,00	98,05%	1,95%
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	100,00	119.700,00	118.500,00	99,00%	1,00%
35	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	59.750.495,00	58.586.500,00	98,05%	1,95%
36	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	22.000.000,00	20.954.000,00	95,25%	4,75%

37	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan	2 Laporan	100,00	22.000.000,00	20.954.000,00	95,25%	4,75%
38	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang disusun	24 Dokumen	24 Dokumen	100,00	37.750.495,00	37.632.500,00	99,69%	0,31%
39	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	3 Dokumen	100,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
40	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	15 Laporan	15 Laporan	100,00	37.750.495,00	37.632.500,00	99,69%	0,31%
41	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase capaian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	2.039.232,00	2.031.000,00	99,60%	0,40%

42	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan masyakat di wilayah kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	2.039.232,00	2.031.000,00	99,60%	0,40%
43	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	2.039.232,00	2.031.000,00	99,60%	0,40%
44	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Konflik yang ditindaklanjuti	100 %	100 %	100 %	6.431.810,00	6.371.500,00	99,06%	0,94%
45	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun	24 Dokumen	24 Dokumen	100,00	6.431.810,00	6.371.500,00	99,06%	0,94%
46	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	2.431.810,00	2.395.000,00	98,49%	1,51%
47	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan	12 Laporan	12 Laporan	100,00	4.000.000,00	3.976.500,00	99,41%	0,59%

		dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat							
48	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran dan pelaporan desa yang disusun dengan benar dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	8.692.099,00	8.632.000,00	99,31%	0,69%
49	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan	24 Dokumen	24 Dokumen	100,00	8.692.099,00	8.632.000,00	99,31%	0,69%
50	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	7.397.575,00	7.371.200,00	99,64%	0,36%
51	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	100,00	1.294.524,00	1.260.800,00	97,39%	2,61%

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2025 ini bahwa target tujuan dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Berjalan, keberhasilan Kecamatan Kampak di dalam penyelenggaraan misi organisasi yang diamanatkan pada tahun anggaran 2025 adalah sebagaimana dapat dilihat pada target, capaian kinerja dan realisasi anggaran, hal ini bisa terlihat sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil perbandingan antara target yang ditentukan, yaitu : 100% dan hasil realisasi anggaran adalah : 72.97 %.
2. Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2024 dan 2025, yaitu :
  - Pada tahun anggaran 2024 realisasi anggaran : 96,16 %
  - Pada tahun anggaran 2025 realisasi anggaran : 72,97 %

Untuk hasil capaian yang lebih baik di tahun-tahun mendatang, perlu adanya upaya-upaya perbaikan antara lain :

1. Mengoptimalkan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.  
Langkah perbaikan yang dilakukan:
  - a. Meningkatkan sarana dan prasarana yang menunjang kepuasan masyarakat penerima layanan kecamatan/ kelurahan, seperti penyediaan ruang laktasi, ruang tunggu yang dilengkapi tempat bermain anak, penyediaan fasilitas pelayanan yang bersahabat dengan penyandang disabilitas, penyediaan bahan bacaan.
  - b. Meningkatkan kualitas dan kapasitas petugas pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Mengoptimalkan koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan di wilayah.  
Langkah perbaikan yang dilakukan :
  - a. Meningkatkan kerja sama dengan OPD lain
  - b. Membangun jejaring komunikasi yang efektif baik internal dan eksternal

Laporan Kinerja (LKjIP) tahun 2025 ini disusun berdasarkan data capaian realisasi kinerja dan anggaran sampai Desember 2025. Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek Tahun 2025, semoga dapat memberikan informasi yang jelas. Mengingat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) akan dipergunakan secara terus menerus dan saling terkait dalam system informasi dan system manajemen instansi pemerintah, maka diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dibuat oleh Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek akan mendapatkan masukan positif dan konstruktif dari berbagai pihak yang terkait sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan dimasa yang akan datang..

Trenggalek, 18 Februari 2026



# LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja APBD Induk dan Perubahan Tahun 2025 (dokumen yang bertanda tangan.



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
KECAMATAN KAMPAK**

*Jl. Raya Kampak - Munjungan Telp (0355)631047  
KAMPAK – Kode Pos. 66373*

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. BUDI PRIYONO  
Jabatan : Plt. CAMAT KAMPAK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOCHAMAD NUR ARIFIN  
Jabatan : BUPATI TRENGGALEK

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 02 Januari 2025

Plt. CAMAT KAMPAK  
KABUPATEN TRENGGALEK

Selaku  
Pihak Pertama,  
  
**Drs. BUDI PRIYONO**  
Pembina

NIP. 19690518 199710 1 001

BUPATI TRENGGALEK  
Selaku  
Pihak Kedua,  
  
**MOCHAMAD NUR ARIFIN**



**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KECAMATAN KAMPAK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (kategori Nilai) SAKIP	82 (A)
2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	94

**JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2025**

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.313.795.509	APBD
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	63.000.000	APBD
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	8.000.000	APBD
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	9.000.000	APBD
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.000.000	APBD
<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>2.418.795.509</b>	<b>APBD</b>

Trenggalek, 02 Januari 2025

BUPATI TRENGGALEK  
Sebagai  
Pihak Kedua,  
**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Plt. CAMAT KAMPAK  
KABUPATEN TRENGGALEK  
Sebagai  
Pihak Pertama,  
**Drs. BUDI PRIYONO**  
Pembina  
NP. 19690518 199710 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK  
KECAMATAN KAMPAK**

Jl. Raya Kampak - Munjungan Telp (0355)631047  
KAMPAK – Kode Pos. 66373

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. BUDI PRIYONO

Jabatan : Plt. CAMAT KAMPAK

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MOCHAMAD NUR ARIFIN

Jabatan : BUPATI TRENGGALEK

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Trenggalek, 03 September 2025

Plt. CAMAT KAMPAK  
KABUPATEN TRENGGALEK

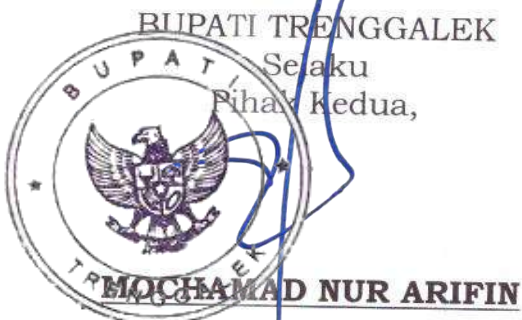
Selaku  
Pihak Pertama,



**Drs. BUDI PRIYONO**

Pembina

NIP. 19690518 199710 1 001



**MOCHAMAD NUR ARIFIN**



**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KECAMATAN KAMPAK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai (kategori Nilai) SAKIP	86,20 (A)
2	Meningkatnya layanan publik secara kolaboratif	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90

**JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2025**

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	KET
1	2	3
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.249.343.747	P-APBD
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	59.750.495	P-APBD
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.039.232	P-APBD
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	6.431.810	P-APBD
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	8.692.099.000	P-APBD
<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>2.326.257.383</b>	<b>P-APBD</b>

Trenggalek, 03 September 2025

BUPATI TRENGGALEK  
Selaku  
Pihak Kedua,  
  
**M. MUHAMMAD NUR ARIFIN**

Plt. CAMAT KAMPAK  
KABUPATEN TRENGGALEK  
Selaku  
Pihak Pertama,  
  
**Drs. BUDI PRIYONO**  
Pembina  
NP. 19690518 199710 1 001